



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EKO WIDIANTO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 457911

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **645.000.000**

1. Tanah Seluas 1702 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI
Rp. 80.000.000
2. Tanah Seluas 530 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI
Rp. 40.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m2/36 m2 di KAB / KOTA
KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/84 m2 di KAB / KOTA
KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 854 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 332 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI
Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **171.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI
Rp. 4.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA G AT Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **500.000**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 816.500.000

III. HUTANG

Rp. 189.827.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 626.673.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.